

**PERAN PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM APBN PADA  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

Nisa Ussa'diyah<sup>1\*</sup>, Ulyya Vidriza<sup>2</sup>, Ahmad Sua'idy<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>nisadiyah12@gmail.com, <sup>2</sup>ullyavidriza@upnvj.ac.id,  
<sup>3</sup>ahmad.suaidy@gmail.com

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

<sup>3</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia

\*Penulis Korespondensi

**Abstrak**

Dalam pelaksanaannya, pinjaman luar negeri dapat memberikan manfaat yang besar terutama pada perannya dalam pembiayaan pembangunan, terutama dalam hal mengejar ketertinggalan negara Indonesia di antara negara lainnya. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya baik dari alam ataupun manusianya yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan. Khusus pada sektor infrastruktur, pendidikan serta kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar mampu memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin yang nantinya dapat memberikan manfaat penuh bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia terutama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah telah berkomitmen dalam mendukung pembangunan dengan mengalokasikan dana pada APBN. Namun kebutuhan yang besar memaksa pemerintah untuk mencari solusi dalam menutup kekurangan pembiayaan antara lain dengan melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh peran pinjaman luar negeri dalam APBN pada pembiayaan pembangunan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana dalam menemukan jawaban dilakukan melalui studi literatur menggunakan teori atau kepustakaan sehingga dapat memberikan gambaran tentang aspek-aspek tertentu dari populasi yang diteliti.

**Kata Kunci:** Pinjaman Luar Negeri; Pembangunan; Indeks Pembangunan Manusia; APBN.

**Abstract**

*In practice, foreign loans can provide great benefits, especially in their role in financing development, especially in terms of catching up with the Indonesian state among other countries. Indonesia has various potential resources, both natural and human, which are able to support the success of development. Especially in the infrastructure, education and health sectors in an effort to improve the quality of human resources so that they are able to utilize natural resources as well as possible which will later provide full benefits for the survival of the Indonesian people, especially in increasing the Human Development Index (IPM). The government has committed to supporting development by allocating funds to the*

*APBN. However, the great need forced the government to find a solution to cover the lack of financing, among others, by withdrawing foreign loans. This study aims to find out more about the role of foreign loans in the APBN in financing development in Indonesia. The research was conducted using descriptive qualitative methods, where finding answers was carried out through literature study using theory or literature so that it could provide an overview of certain aspects of the population being studied.*

**Keywords:** *Foreign Loans; Development; Human Development Index; APBN.*

## **1. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan ekonomi, negara Indonesia sering dihadapkan oleh banyaknya persoalan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat jika tidak segera diatasi. Pada kenyataannya, Indonesia masih banyak mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, baik pada sektor infrastruktur ataupun dalam upaya pembangunan manusianya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal Indonesia diharapkan agar mampu menunjukkan dirinya kepada dunia sebagai negara dengan ekonomi terbesar seperti beberapa negara lainnya di masa yang akan datang. Artinya, Indonesia membutuhkan pembangunan yang merata di setiap wilayah hingga daerah terpencil. Pembangunan diartikan sebagai proses mengubah sesuatu menjadi lebih baik agar manfaatnya dapat dinikmati oleh penduduk di beberapa tahun ke depan. Dan pembangunan pada dasarnya dilakukan dalam upaya untuk menyejahterakan rakyat baik secara fisik maupun spiritual. Dalam mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah telah mencanangkan beberapa proyek pembangunan secara masif.

Banyak proyek pembangunan nasional yang didanai dari APBN, seperti pembangunan infrastruktur, industri, pendidikan, dan kesehatan. Seperti halnya proyek jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan termasuk program vaksinasi maka akan membutuhkan sumber daya modal yang besar. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, pembangunan pada suatu negara tidak dapat dilakukan jika hanya dengan bermodalkan keyakinan dari seluruh rakyat dalam membangun negerinya. Sehingga apabila pemerintah hanya mengandalkan pendapatan berupa pajak maka tidak akan mampu dalam memenuhi seluruh kebutuhan dananya dan kebutuhan dana yang membengkak akan memicu tingginya defisit anggaran dalam APBN. Artinya pemerintah perlu memikirkan cara lain dalam memperoleh sumber modal yang dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menutupi kekurangan biaya adalah dengan melakukan penarikan pinjaman atau utang.

Pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah, antara lain dilakukan melalui penarikan pinjaman. Pinjaman ini akan sangat membantu pemerintah dalam hal pendanaan pembangunan proyek Kementerian/Lembaga. Pinjaman atau utang adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri atau Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Ada dua jenis pinjaman yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Khususnya Pinjaman Luar Negeri (PLN) akan digunakan untuk membiayai pembiayaan defisit APBN dan juga kegiatan/proyek tertentu. Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas peran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam APBN diperlukan kajian khusus untuk menganalisisnya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA** ***Pembangunan di Indonesia***

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan bagi Indonesia terutama agar negara Indonesia ini lebih dilihat oleh negara lain. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan sebagai tahapan proses yang pasti dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan agar dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh rakyatnya. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat (Digdowiseiso, 2020). Pembangunan dilakukan dengan tujuan utama, yaitu untuk menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dan diketahui jika, pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian (Mariska Ishak Rudi, dkk 2016) Dapat disimpulkan bahwa ULN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan ULN berperan dalam menutupi defisit anggaran, dan pemerintah membelanjakan lebih dari penerimaannya sehingga mengakibatkan defisit anggaran, sehingga pemerintah perlu memperoleh tambahan penerimaan melalui ULN (Rudi, Rotinsulu, & Tenda, 2016). Artinya, dengan penarikan pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah maka akan memberikan pengaruh positif terutama dalam pembiayaan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Penduduk memiliki peran yang sangat penting dimana penduduk berperan sebagai modal utama dalam membangun negeri. Kualitas penduduk suatu negara akan menentukan kemampuan suatu negara dalam mengelola Dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada agar hasilnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki peran yang luas, mencakup berbagai konteks pembangunan, karena infrastruktur berperan dalam membangun suatu daerah dengan menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang melimpah sumber daya alamnya juga didiami oleh penduduk yang banyak, artinya hal tersebut akan menjadi potensi besar dalam keberhasilan pembangunan. Pemerintah mendukung dalam upaya pembangunan di Indonesia. Dalam APBN, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan yang akan berdampak bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh anggaran pembangunan pada infrastruktur diadakan dalam memenuhi penyediaan layanan dasar, peningkatan hubungan antar daerah serta dukungan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pada anggaran pendidikan ditujukan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pendidikan serta meningkatkan kompetensi pengajar dan juga para guru. Sedangkan anggaran kesehatan bertujuan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penguatan pada sistem kesehatan.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan prioritas tinggi pada pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Hingga tahun 2025, pemerintah telah menetapkan beberapa target perencanaan yang masif agar dapat segera tercapai tujuannya. Dalam mencapainya pemerintah pun meluncurkan rencana pada tiga pembangunan yang saling berkaitan dalam mendukung target pemerintah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Indonesia Investment, n.d.). Terkait bidang pembangunan manusia dan budaya, seperti prioritas nasional untuk meningkatkan ketahanan ekonomi serta pertumbuhan yang berkualitas dan merata maka pelaksanaan rencana prioritas nasional atau agenda pembangunan perlu diperkuat.

### ***Pembiayaan Pembangunan Melalui Pinjaman Luar Negeri***

Seperti yang diketahui jika hingga kini Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor, tepatnya pada pembangunan pada infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk pada bidang pendidikan dan kesehatan (DJPRR – Pahami Utang Negara, n.d.). Penerimaan negara khususnya perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk membiayai beberapa kegiatan penunjang pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun, dikarenakan melonjaknya biaya kebutuhan sumber modal pada pembiayaan pembangunan yang telah direncanakan dan mengingat penerimaan pajak belum cukup dalam menutupi seluruh pendanaan pembangunan maka pemerintah perlu berupaya menutupi kekurangan tersebut. Pemerintah melalui banyak pertimbangan baik biaya maupun risikonya memilih pembiayaan melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebagai solusinya untuk melengkapi kekurangan pendanaan pembangunan.

Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri telah menjadi unsur penting dan erat kaitannya pada proses pembiayaan pembangunan bagi negara berkembang termasuk Indonesia (Fadillah & Sutjipto, 2018). Melalui penarikan pinjaman ini, Pemerintah berharap dapat mendorong percepatan pembangunan secara merata sehingga mampu menciptakan pengaruh yang luas Bagi perekonomian nasional, juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara, yang akan digunakan untuk membangun kembali dan membayar cicilan utang pinjaman kita. Melalui program pembiayaan utang dan non-utang, pemerintah berharap tercapainya pengelolaan APBN yang kredibel, *prudent*, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Utang pemerintah juga digunakan untuk menutup defisit, memenuhi kewajiban pemerintah (membayar cicilan pokok pinjaman dan melakukan *buyback*), serta pengeluaran pembiayaan seperti investasi kepada BUMN, lembaga/badan lainnya, BLU, dan organisasi/lki/badan usaha internasional (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.02/2020).

Pembiayaan pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBN juga dibantu oleh pinjaman Luar Negeri atau yang sering disingkat dengan PLN. Keynes juga memberikan pemahaman tentang pertimbangan utama pemerintah dalam melakukan pinjaman luar negeri, yaitu tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri didefinisikan sebagai bagian dari total utang suatu negara dari pemberi pinjaman yang berasal dari luar negeri. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan yang diperoleh pemerintah melalui utang dari pemberi pinjaman luar negeri dengan perjanjian pinjaman, tidak dalam bentuk surat berharga negara yang harus ada persyaratan tertentu.

Ada dua jenis pinjaman luar negeri: pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, pinjaman tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dan/atau rupiah untuk membiayai defisit APBN dan mengelola portofolio utang. Pinjaman kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian/lembaga nasional, pinjaman kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik negara, dan pinjaman yang terus dihibahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain untuk pembiayaan defisit khususnya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dikarenakan bantuan luar negeri sebenarnya memiliki *multiplier effect* yang positif terhadap perekonomian dan pinjaman luar negeri secara jangka pendek dapat menutupi defisit APBN yang jauh lebih baik daripada defisit APBN, sehingga pemerintah dapat berkembang dengan dukungan keuangan yang lebih besar (Yunus,

Rahmatia, Anwar, & Fattah, 2021).

Selanjutnya, dalam pengadaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Pengelolaan pinjaman luar negeri meliputi perencanaan, perundingan, penganggaran, penarikan, dan pembayaran pinjaman (setelmen), penatausahaan, *monitoring* dan evaluasi, serta publikasi. utang luar negeri yang diterima dapat dalam bentuk pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Selain itu, adapun lembaga pemberi pinjaman luar negeri, yaitu multilateral yang terdiri dari World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan International Fund for Agricultural Development. Sedangkan lembaga bilateral, yaitu JICA, KFW, Cexim Bank, dan AFD. Lalu pada lembaga komersial/KSA, yaitu ING, BNP PARIBAS, Credit Agricole, UniCredit, dan lainnya. Dalam Pasal 7 PP No. 10/2011, diatur tentang utang luar negeri diperuntukkan bagi pembiayaan defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga, mengelola portofolio hutang, dapat diteruskan pada pemerintah daerah, diteruskan pada BUMN dan dapat dihibahkan pada pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah pun dapat meneruskan hutang luar negeri pemerintah pusat pada pengembangan BUMD di daerah tersebut.

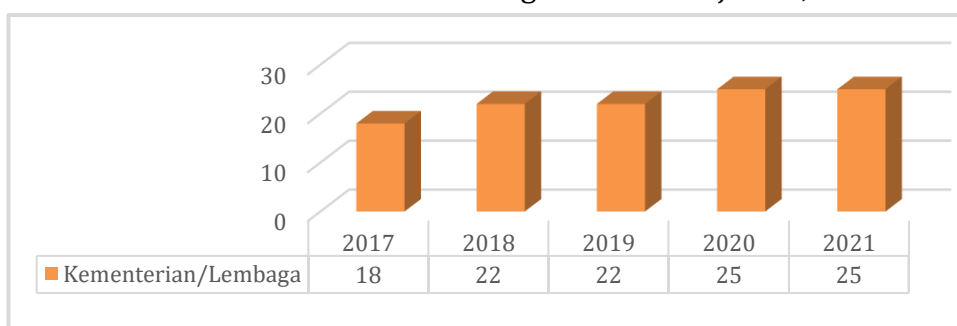
### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini mengkaji persoalan tersebut dari perspektif ekonomi dan bertujuan untuk memahami peran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam APBN pada pembiayaan pembangunan di Indonesia dimulai dari tahun 2017 hingga 2021. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencari jawaban melalui studi literatur, kajian teori, atau kepustakaan untuk memberikan gambaran tentang beberapa aspek dari populasi yang diteliti. Selain itu, data yang dihimpun berasal dari *website* resmi seperti lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia ataupun situs-situs resmi seperti detikNews dan web resmi kementerian seperti web Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dari jurnal ilmiah yang mendukung penelitian ini. Dikarenakan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif maka data yang diinterpretasikan lebih jelas dan informatif sehingga pembaca dapat lebih mudah dalam memahami hasil dari penelitiannya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah dalam menarik Pinjaman Luar Negeri (PLN) sudah menjadi bagian penting pada pengelolaan keuangan di Indonesia. Dikarenakan pinjaman tersebut digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan upaya menutup defisit anggaran dalam menopang keadaan fiskal yang berkesinambungan. Setiap tahunnya pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dalam APBN. Selain itu, pemerintah juga telah membantu dalam memberikan arahan mana saja proyek yang menjadi prioritas pembangunan serta para K/L juga sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan proyek yang nantinya akan dibantu dananya melalui Pinjaman Luar Negeri.

Gambar 1. Jumlah Kementerian/Lembaga Penarik Pinjaman, 2017-2021



Pada data terlihat jumlah Kementerian/Lembaga yang menarik pinjaman guna menutup kekurangan dana dalam pembangunan proyeknya pada tahun 2017 hingga 2021. Terlihat juga jika terdapat penambahan jumlah K/L penarik Pinjaman Luar Negeri pada setiap tahunnya. Terdapat beberapa K/L yang tiap tahunnya rutin melakukan penarikan pinjaman untuk membantu mendanai proyeknya, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, kementerian Perhubungan, kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan lainnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam pembiayaan pembangunan pada berbagai sektor maka nantinya diharapkan agar dapat meningkatkan kemampuan serta perkembangan pada wilayah daerahnya. Selanjutnya para K/L akan diberikan besaran proporsi sesuai dengan kebutuhan pada berbagai sektor dalam menarik pinjamannya.

Gambar 2. Proporsi Pembiayaan Melalui Pinjaman Luar Negeri hingga Tahun 2021

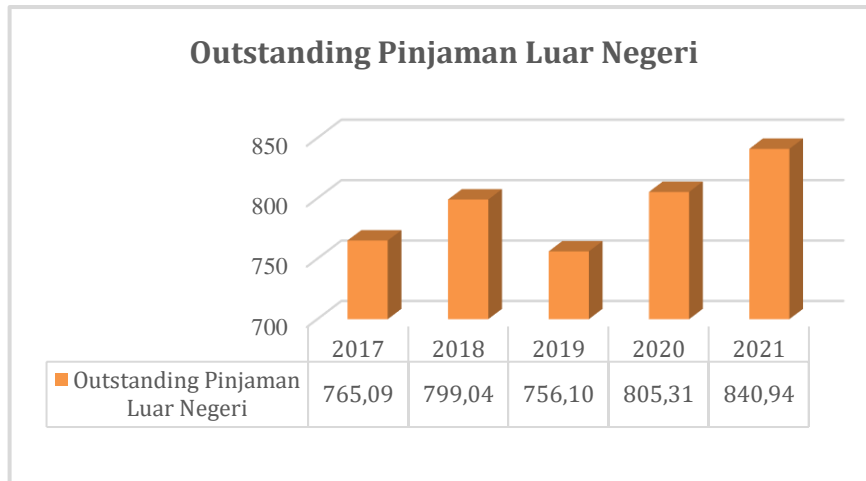


Gambar memperlihatkan data proporsi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri pada kegiatan per-sektor yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga hingga akhir tahun 2021. Terlihat pada diagram jika pada sektor konstruksi, memperoleh proporsi sebesar 11% dari total keseluruhan dan angka tertinggi kedua dalam proporsi pembiayaan. Sektor konstruksi menjadi penerima porsi pinjaman luar negeri terbesar kedua dikarenakan pemerintah memiliki tujuan yang besar dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakatnya, daya saing di kancah internasional serta berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

Selanjutnya pada sektor jasa pendidikan memperoleh proporsi sebesar 9% dan tertinggi ketiga setelah konstruksi dan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memperoleh proporsi pembiayaan sebesar 8% atau hanya berbeda sebesar 1% dengan sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, penanggulangan bencana, dll. Dan pada saat yang sama juga perlu meningkatkan kualitas hasil pendidikan dalam layanan pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan di pelayanan kesehatan dengan memperkuat sistem kesehatan.

Pembagian besaran proporsi pinjaman bagi para K/L akan menentukan jumlah total dari pinjaman luar negeri yang akan terus terakumulasi dalam *outstanding* pinjaman luar negeri. *Outstanding* atau Posisi Utang adalah posisi yang menunjukkan jumlah utang penerima pinjaman pada saat tertentu.

Gambar 3. *Outstanding* Pinjaman Luar Negeri, 2017-2021 (Triliun Rupiah)



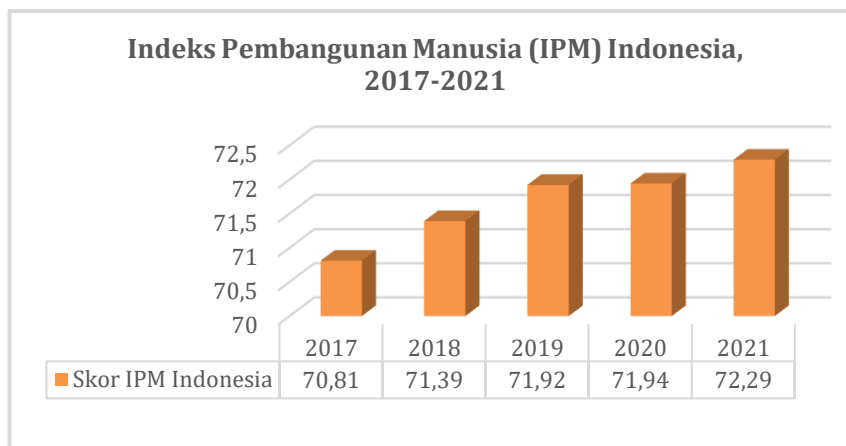
Data menunjukkan besarnya *outstanding* pinjaman luar negeri atau utang pemerintah dari tahun 2017 hingga 2021. Terlihat jika besaran angka yang muncul sangat berfluktuasi baik naik ataupun turun. Terutama pada tahun 2018 yang awalnya sebesar Rp 799,04 triliun kemudian pada tahun 2019 turun menjadi Rp 756,10 triliun dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan mencapai Rp 805,31 triliun. Seperti yang diketahui jika di awal tahun 2020 hampir seluruh dunia dikagetkan dengan kemunculan virus Covid-19. Dan di tahun tersebut merupakan tahun yang sangat berat bagi Indonesia akibat merebaknya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Hal tersebut pastinya membuat kepanikan yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat berubah dan pendapatan masyarakat ikut menurun yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu. Tidak hanya itu, permasalahan-permasalahan lainnya ikut muncul yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat maupun negara, sehingga membuat pemerintah harus lebih banyak melakukan penarikan pinjaman terutama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meskipun *outstanding* utang pemerintah terus mengalami kenaikan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BI yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), diketahui jika pemerintah lebih banyak melakukan penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dikarenakan pinjaman program memiliki peran sebagai pendamping SBN selama pandemi.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah didukung pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari skor IPM dan juga perkembangan infrastruktur yang pembangunannya dilakukan secara merata hingga menyentuh daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Diagram pada gambar menunjukkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Terlihat pada diagram, Rata-rata skor IPM dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan angka yang besar yaitu 71,67. Dan terlihat jika skor IPM Indonesia dari tahun 2017 selalu mengalami kenaikan dan hingga 2021. Diagram juga menunjukkan angka kenaikan yang terjadi cukup tinggi, di mana pada tahun 2020 sebesar 71,94 lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 72,29.

Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2017-2021



Dapat diketahui jika skor dibagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya jika  $IPM \geq 80$  dikategorikan sangat tinggi,  $70 \leq IPM < 80$  dikategorikan tinggi,  $60 \leq IPM < 70$  dikategorikan sedang, dan rendah jika  $IPM < 60$ . Dan melihat rata-rata skor IPM Indonesia mencapai 71,67 sehingga dapat dikatakan sebagai kategori yang memiliki pencapaian tinggi. Rata-rata kenaikan skor setiap tahunnya mencapai 0,38%, ini menandakan terdapat perbaikan dari adanya pembangunan yang telah dirasakan masyarakat Indonesia termasuk dari adanya pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. IPM memiliki manfaat sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pembangunan dapat dikatakan semakin berhasil apabila angka Indeks Pembangunan Manusia semakin tinggi dan baik (Susilowati & Suliswanto, 2015). Selain itu, IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga terus mendukung dengan memprioritaskan pembangunan-pembangunan guna mengejar ketertinggalan negara Indonesia. Pemerintah berupaya tetap konsisten dalam mendukung pembangunan melalui alokasi pembiayaan pada infrastruktur dalam APBN yang terus ditingkatkan. Meskipun Indonesia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang berakibat pada terhambatnya pembangunan yang awalnya sudah direncanakan karena dana yang harus dialih alokasinya dan pembatasan sosial. Dilansir dari detikNews, hingga Agustus 2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 di antaranya, yaitu pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang dengan panjang 37,62 km, Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dengan panjang 131,5 km dan menjadi bagian dari ruas Trans Sumatera, Jalan Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km, Jalan Tol Manado-Bitung dengan panjang 39 km, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang 99 km, pembangunan Bendungan Marangkayu, dan lain sebagainya (Baidarus, 2021). Dengan banyaknya proyek infrastruktur yang telah selesai dibangun maka diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat karena lebih mudahnya akses mobilitas dan produktivitas masyarakat.

## 5. SIMPULAN

Keberhasilan pembangunan pada suatu negara akan menunjukkan seberapa besar kualitas bangsa tersebut. Pemerintah juga telah menyadari pentingnya pembangunan di negara Indonesia dengan upaya memberi dukungan pada pembangunan di berbagai wilayah guna mendongkrak kemampuan wilayah tersebut. Pinjaman luar negeri memberikan peran besar



pada APBN, sebab selain untuk membantu menutup defisit anggaran, pinjaman juga berperan dalam membantu menutup kekurangan sumber modal dalam pembiayaan pembangunan proyek dari beberapa Kementerian/Lembaga demi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Dikarenakan pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan sumber pendapatan khususnya dari pajak saja. Meskipun pinjaman luar negeri juga memiliki fungsi dalam menutup defisit anggaran tetapi peran pinjaman luar negeri penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia tetap dirasa penting dikarenakan dengan pembangunan maka pemerintah mampu meningkatkan kualitas penduduknya.

Dapat diketahui jika dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat sedikitnya 18 K/L pada tahun 2021 yang menarik pinjaman dan pada tahun 2021 mencapai 25 K/L. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana dan membaginya dalam beberapa besaran porsi pinjaman luar negeri sesuai dengan kebutuhan para K/L, layaknya pada sektor konstruksi sebesar 11%, sektor jasa pendidikan sebesar 9%, dan sektor jasa kesehatan sebesar 8%. Selanjutnya, pemerintah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam mengelola utang negara serta pemanfaatannya agar efisien dalam penggunaannya. Prinsip tersebut di antaranya, yaitu efisiensi biaya, kehati-hatian, dan keseimbangan utang dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, hal tersebut juga berlaku untuk para Kementerian/Lembaga penarik pinjaman agar dapat memanfaatkan dana pinjaman secara penuh untuk pembangunan proyeknya sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baidarus, M. (2021). *Infrastruktur Masih Jadi Tumpuan Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi*. From news.detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-5697178/infrastruktur-masih-jadi-tumpuan-dongkrak-ekonomi-di-tengah-pandemi>
- Digdowiseiso, K. (2020). *Teori Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPU-UNAS. From [http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf](http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku%20Teori%20Pembangunan.pdf)
- DJPRR – Pahami Utang Negara. (n.d.). Retrieved April 25, 2022 from <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php>
- Fadillah, N. D., & Sutjipto, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 212–226. doi:<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4449>
- Indonesia Investment. (n.d.). *Rencana Pembangunan Ekonomi Pemerintah Indonesia*. Retrieved April 25, 2022 from Indonesia-investments.com: <https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/item305?>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.02/2020*.
- Rudi, M. I., Rotinsulu, T. O., & Tenda, A. (2016). Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009.3-2014.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 325–333.
- Susilowati, D., & Suliswanto, M. S. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89-106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.
- Yunus, R., Rahmatia, R., Anwar, A. I., & Fattah, S. (2021). Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *YUME : Journal of Management*, 4(1), 151–161.